

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan sebagai *human investment* hingga saat ini di Indonesia masih berkebutakan dengan persoalan efisiensi dan efektivitas. Tidak terkecuali dengan lembaga PAUD sebagai salah satu komponen system pendidikan nasional. Keberadaan PAUD yang sudah diakui. Situasi seperti diatas kemudian menghajatkan adanya manajemen pembiayaan pendidikan yang mampu memberikan jaminan bagi lembaga PAUD untuk melaksanakan proses pendidikan secara efektif dan efisien sekaligus mampu melayani setiap peserta didik untuk memperoleh pendidikan secara merata dan setinggi-tingginya. Jika jaminan ini bisa diberikan oleh lembaga PAUD maka akan menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas, unggul, efektif sehingga image lembaga PAUD semakin positif dimata masyarakat.

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting dalam system pendidikan nasional pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang hendak dicapai dalam konteks ke-Indonesiaan persoalan pembiayaan pendidikan secara jelas terjadi karena secara yuridis formal pemerintah hanya sanggup mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN.

Penjaminan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, pemerintah telah menetapkan standar atau kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang disebut dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sebagaimana dinyatakan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan, bahwa standar nasional pendidikan terdiri dari 8 (delapan) standar yang meliputi: Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian. Jika semua standar tersebut dapat dipenuhi, maka satuan pendidikan dapat dinyatakan berstandar nasional.

Standar nasional pendidikan dibutuhkan manajemen yang baik di satuan pendidikan. Manajemen adalah segenap perbuatan menggerakkan sekelompok petugas dan mengarahkan segenap sarana dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Manajemen sebagai *“a typical process that consist of the actions of planning, organizing, and controlling mobilization undertaken to determine and achieve the goals that have been determinded other resource utilization.”* Terdapat empat fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/ pelaksanaan dan pengawasan/evaluasi. Fungsi perencanaan sebagai langkah awal dalam manajemen harus dilakukan secara cermat karena perencanaan memberikan arah, pegangan dan kunci bagi fungsi pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Perencanaan yang matang akan menghasilkan produk yang baik. Fungsi pengorganisasian berkaitan dengan sumber daya manusia di satuan pendidikan dan sumber-sumber material. Kegiatan pengorganisasian merupakan kegiatan membagi-bagi pekerjaan kepada semua unsur yang terlibat dalam satuan pendidikan. Setiap unsur saling berkoordinasi dalam merealisasikan perencanaan yang telah disusun. Agar program dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu digerakkan dengan cara mengarahkan, memberi komando yang jelas untuk setiap unsur yang terlibat, koordinasi, pemberian motivasi dan dikelola dengan kepemimpinan yang baik. Untuk mengetahui perkembangan dan hasil dari pencapaian program, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Pada tahapan ini kegiatan

pengawasan menjadi bagian penting dalam proses manajemen penyelenggaraan program di satuan pendidikan.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang tertuang dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014. Peraturan ini dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk penyesuaian dan kesiapan dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 pada pendidikan anak usia dini. Sebelum dikeluarkannya Permendikbud No. 137 Tahun 2014, sebenarnya Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu dengan diterbitkannya Permendiknas No. 58 Tahun 2009. Peraturan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini. Untuk mencapai generasi Emas, tentu saja bukan hanya akses PAUD yang perlu menjadi concern pemerintah, namun mutu lembaga PAUD juga perlu menjadi perhatian. Semangat mendirikan lembaga PAUD yang sangat pesat sekali, perlu diimbangi dengan semangat meningkatkan mutu atau kualitas lembaga PAUD yang di standarkan pemerintah mengacu pada peraturan pemerintah nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan PAUD.

Kenyataannya masih banyak lembaga PAUD yang belum melakukan kegiatan penjaminan mutu, baik secara internal melalui pemetaan mutu, maupun pelaksanaan mutu internal melalui badan akreditasi. Target BANPAUD sendiri ditahun 2020 semua lembaga PAUD sudah terakreditasi. Oleh karena itu perlunya lembaga PAUD untuk meningkatkan kualitas melalui penjaminan mutu baik secara internal maupun eksternal.

Standar pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD. Sedangkan standar pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD. Terkait dengan hal ini, secara umum antara Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dengan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 mempunyai persamaan. Yang membedakan hanya pada penjelasan dari masing-masing komponen, baik komponen standar pengelolaan maupun standar pembiayaan.

Standar pembiayaan mencakup anggaran penerimaan dan belanja satuan (RAPBS), administrasi keuangan dan laporan keuangan yang meliputi biaya investasi biaya operasional dan biaya personal. Standar pembiayaan pendidikan sangat diperlukan dalam penyelenggara dan pengembangan PAUD. Standar pembiayaan merupakan salah satu standar penyelenggaraan PAUD dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, biaya investasi yang digunakan untuk pengadaan sarana prasarana, pengembangan Sumber Daya Manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasional yang dipergunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak langsung. Biaya personal, meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran.

Biaya operasional PAUD disebut Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD). BOP PAUD diberlakukan sejak tahun 2009. Penggunaan BOP diatur dengan jelas dalam Permendikbud Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Petunjuk Teknis (Juknis) tersebut memaparkan dengan sangat jelas tentang pengelolaan BOP PAUD mulai dari

perencanaan, implementasi, prosedural penggunaan dana, monitoring, supervisi, dan pelaporan.

Saat ini, pendidikan memiliki banyak tantangan seiring semakin berkembangnya zaman, keberagaman budaya, persaingan keuangan dan perkembangan teknologi, sehingga akan berpengaruh terhadap sistem dan kebutuhan pendidikan yang harus diberikan kepada peserta didik, terutama untuk peserta didik dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). PAUD dengan kualitas yang baik dapat memberikan manfaat dalam jangka pendek dan panjang bagi kehidupan anak. Sebagaimana pada penelitian yang dilakukan oleh Kodarni bahwa dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan di tingkat apa pun perlu adanya pengelolaan yang baik. Hal tersebut juga didukung pada penelitian yang dilakukan oleh Ridha, Markhamah dan Darsinah bahwa tanpa adanya pengelolaan yang baik, tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif, dan efisien.

Di Indonesia, secara umum evaluasi pendidikan dilakukan melalui berbagai pendekatan seperti kegiatan Monitoring and Evaluation (*Monev*) atau supervisi yang dilakukan oleh pengawas pendidikan dan evaluasi pendidikan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) melalui akreditasi. Namun demikian, evaluasi pendidikan tersebut masih belum efektif dalam memberikan umpan balik (*feedback*) bagi lembaga pendidikan untuk memahami apa saja yang menjadi area yang sudah baik dan area yang perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan oleh pendekatan evaluasi yang masih berbasis kuantitatif, dengan kata lain hasil evaluasi tersebut belum memberikan informasi yang komprehensif dan eksplisit mengenai kualitas setiap standar pendidikan di satuan pendidikan.

Evaluasi terhadap pengelolaan pembiayaan lembaga PAUD yang diteliti dalam standar pembiayaan terbagi kedalam pengorganisasian yaitu tugas dan fungsi struktur

organisasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, proses yaitu perencanaan pembelajaran, sarana dan prasarana dan pembiayaan, serta pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan untuk menilai ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga PAUD. Dari hasil evaluasi tersebut, akan ditemukan hal-hal yang masih kurang dan hal-hal yang perlu dipertahankan dari program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah PAUD AR menemukan bahwa sumber dana pembiayaan yang didapatkan dari bantuan BOP reguler, kinerja dan Pemerintah. Dana BOP yang didapatkan berupa APE atau alat permainan edukatif, alat tulis untuk kegiatan pembelajaran serta alat kesehatan dan pembiayaan wifi. Untuk reguler semua lembaga PAUD mendapatkannya yang dilihat dari dapodik atau jumlah siswa yang dikalikan dengan Tujuh Ratus Ribu Rupiah. Dana BOP diterima satu tahun 2 kali cair, pada tahap pertama dalam sekolah penggerak berjumlah Tiga Puluh Juta. namun dibagi menjadi dua. Pembiayaan dengan pihak yayasan sudah tidak ada, bantuan berupa barang tersebut dikelola sendiri.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan dilakukan secara bersama dengan kepala sekolah, maupun guru-guru dengan bukti pengeluaran dan pemasukan dalam bentuk nota pembelanjaan, kuitansi, kemudian dokumentasi barang yang sudah dibelanjakan. Namun masalah anggaran yang didapatkan masih kurang untuk kebutuhan yang biayanya berjumlah besar seperti laptop. Dalam konsep pembiayaan pendidikan tentunya tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber dana pendidikan, tetapi juga bagaimana penggunaan dana tersebut secara efektif. Sumber pendapatan dana pendidikan diperoleh melalui iuran siswa, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah swasta. Pendapatan yang diperoleh melalui sumber dana perlu dikelola dengan baik, sehingga dapat dilaksanakan

antara pendapatan ataupun pengeluaran. Berdasarkan masalah yang peneliti temukan pada PAUD Alkhairat Kalumpang Kota Ternate. Peneliti menemukan adanya masalah terkait dengan pembiayaan yang terjadi pada sekolah tersebut kurangnya anggaran untuk memperbaiki bangunan sekolah, peneliti juga menemukan adanya masalah lain yaitu terkait dengan pembayaran spp dari orang tua mengakibatkan keterlambatan penerimaan gaji guru.

Masih terdapat berbagai masalah dalam pengembangan program PAUD ini. Layanan PAUD yang bermutu dapat direalisasikan melalui pengelolaan penyelenggaraan PAUD yang optimal, namun saat ini masih banyak ditemukan lembaga PAUD yang mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan PAUD yang optimal. Penyebabnya adalah karena keterbatasan kompetensi manajerial yang dimiliki oleh pengelola PAUD. Berdasarkan pemamparan diatas, Untuk itu penulis tertarik dalam melakukan pembahasan dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Standar Pembiayaan Pada TK Alkhairat Kalumpang Kota Ternate”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masalah yang terjadi pada PAUD Alkhairat Kalumpang Kota Ternate adalah kurangnya anggaran untuk merenovasi gedung sekolah,
2. Keterlambatan orang tua membayar spp berdampak pada keterlambatan sekolah mencairkan gaji guru.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penelitian memfokuskan pada pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Standar Pembiayaan Pada Tk Alkhairat Kalumpang Kota Ternate

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pada Tk Alkhairat Kalumpang Kota Ternate?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pada Tk Alkhairat Kalumpang Kota Ternate?

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan masalah diatas disusun dengan harapan dan dapat memeberi manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian sementara ini adalah memberikan wawasan mengenai Pembiayaan Pendidikan yang diterapkan serta memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam perspektif di bidang pengelolaan pembiayaan pendidikan. Terutama pada Tk Alkhairat Kalumpang Kota Ternate.

2. Manfaat praktis

a. Sekolah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pembiayaan pendidikan bagi pengelola satuan pendidikan dalam membuat suatu kebijakan, pengelola sekolah dan mengelola dana pendidikan secara efisien dan efektif guna peningkatan mutu pendidikan

b. Pembaca

Menjadi sumber referensi dan informasi dan referensi bagi orang yang membaca skripsi ini dalam menambah ilmu pengetahuan dan memberikan jawaban mengenai penelitian yang dilakukan yaitu Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Standar Pembiayaan Pada Tk Alkhairat Kalumpang Kota Ternate.